



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023 (RLPPD)

#AyoKepalopo



Asrul sani, S.H., M.Si.
Pj Walikota Palopo

VISI

"TERWUJUDNYA PALOPO
SEBAGAI KOTA MAJU,
INOVATIF DAN BERKELANJUTA
PADA TAHUN 2023"

MISI:

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan, serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi, dan ruang terbuka hijau
3. Memodernisasi kayanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan
4. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya luwu



177.526 jiwa

Jumlah Penduduk
Kota Palopo



88.833

Jumlah Penduduk
Perempuan



88.693

Jumlah Penduduk
Laki-laki

CAPAIAN KINERJA MAKRO

80,77 ^{Tahun 2022} > 80,24
Indeks Pembangunan
Manusia

7,69 ^{Tahun 2022} < 7,78
Angka Kemiskinan

7,81 ^{Tahun 2022} < 8,2
Angka Pengangguran

4,34 ^{Tahun 2022} < 5,83
Pertumbuhan Ekonomi

54,47 ^{Tahun 2022} > 51,45 Juta
Pendapatan per Kapita

0,367 ^{Tahun 2022} < 0,371
Ketimpangan Pendapatan

CAPAIAN URUSAN PELAYANAN DASAR



Bidang Pendidikan

Tingkat partisipasi warga
negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini
56,98%

Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar
80,85%

Tingkat partisipasi WN usia
13-15 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan menengah
pertama
61,59%



Bidang Kesehatan

Rasio daya tampung RS
terhadap Jumlah
Penduduk
22,36%

Persentase RS Rujukan
Tingkat kabupaten/kota
yang terakreditasi
100%

Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil
88,86%

Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan
94,37%

Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
95,22%

Cakupan pelayanan
kesehatan balita sesuai
standar
88,95%

Persentase anak pendidikan
dasar yg mendapatkan
pelayanan kesehatan
102,11%

Persentase orang usia 15-59
tahun mendapatkan
skrining kesehatan
80,17%

Persentase warga negara u.
>60 tahun mendapatkan
skrining kesehatan
97,48%

Persentase penderita
hipertensi yg mendapatkan
pelayanan kesehatan
86,79%

Persentase penderita DM
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
98,78%

Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa
86,04%

Persentase orang terduga
TBC mendapatkan
pelayanan TBC
97,85%

Persentase orang dgn resiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV
101,93%



Bidang PUPR

Rasio luas kawasan permukiman
rawan banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur pengendalian
banjir di WS Kewenangan
Kab/Kota dengan capaian
65,36%

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis
yang memiliki sertifikat kompetensi
dengan capaian
45,45%

Rasio luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten/kota
yang dilayani oleh
jaringan irigasi dengan capaian
90,90%

Persentase jumlah rumah tangga
yang mendapatkan akses terhadap
air minum melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
kabupaten/kota dengan capaian
84,38%

Persentase jumlah rumah tangga
yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestik
dengan capaian
82,68%

Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
dengan capaian
100%

Tingkat Kemantapan Jalan
kabupaten/kota dengan capaian
65,21%



Bidang Perumahan Rakyat

Berkurangnya jumlah unit
RTLH (Rumah Tidak Layak
Huni)
7,03%

Jumlah perumahan yang
sudah dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana dan Utilitas)
100%

Hunian untuk Penyediaan dan
rehabilitasi rumah layak huni
bagi korban bencana
kabupaten/kota
100%

Facilitasi hunian penyediaan
rumah layak huni bagi masyarakat
terdampak relokasi program
pemerintah kabupaten/kota dengan
100%



Bidang Sosial

Penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya
di luar pantai (Indikator SPM)
100%

Korban bencana alam dan sosial
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah kabupaten/kota dengan
100%



Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
diselesaikan
100%

Jumlah WN yg memperoleh
layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
100%

Jumlah WN yg memperoleh
layanan pencegahan &
kesiapsiagaan bencana
100%

Waktu tanggap (response
time) penanganan
kebakaran
6 min

Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan
100%

Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan informasi
rawan bencana
100%

Persentase pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban kebakaran
100%

REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Daerah

Rp. 943.087.588.524,71

Anggaran: Rp. 1.132.254.991.869,00

83,29%

Realisasi Belanja

Rp. 927.786.559.564,18

Anggaran: Rp. 1.144.221.381.279,00

81,08%

INOVASI DAERAH

- 1 "OPU DATU"
- 2 "SIPORAIKI"
- 3 WARA BERBENAH
- 4 PIKMOL
- 5 SIDUPPA
- 6 SIKEPO
- 7 SiELIT BANKSA
- 8 LAYANAN DIMEDSOS
- 9 SIPADA
- 10 KOPI MANTAP
- 11 PATIKALA
- 12 SIMPONI CERIA

HASIL OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

9

Kali berturut-turut
mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)



LEVEL 3
Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)



LEVEL 3
Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA PALOPO



TAHUN
ANGGARAN
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GRAFIK iv

I. Latar Belakang 1

1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah 1

1.2 Data Geografis Wilayah 1

1.3 Jumlah Penduduk 2

1.4 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan..... 3

1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai
Pemerintah 6

II. Capaian Kinerja Makro 8

2.1 Indeks Pembangunan Manusia 8

2.2 Angka Kemiskinan..... 9

2.3 Angka Pengangguran 10

2.4 Pertumbuhan Ekonomi 11

2.5 Pendapatan Per-Kapita 12

2.6 Ketimpangan Pendapatan 13

III. Capaian Kinerja Pelayanan Dasar 14

3.1 Pendidikan..... 14

3.2 Kesehatan 15

3.3 Perumahan Dan Kawasan Permukiman 15

3.4 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang..... 16

3.5 Bidang Sosial 16

3.6 Bidang Ketentraman Dan Ketertiban 16

IV. Hasil Eppd Dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
Sebelumnya 17

4.1 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 17

4.2 Opini Laporan Keuangan Daerah..... 18

V. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 18

VI. Inovasi Daerah 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Luas Daerah dan Keadaan Geografis Di Kota Palopo 2

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Terhadap Jenis Kelamin 3

Tabel 1.4 Daftar nama Kecamatan dan Kelurahan se Kota Palopo..... 4

Tabel 1.5 Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palopo
Menurut Instansi Dan Golongan Di Kota Palopo Tahun 2023..... 6

Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo Menurut Dimensi
Penyusunnya, 2021-2023 8

Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan (tahun), 2020– 2023..... 10

Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota PalopoTahun2021–2023 11

Tabel 3.1 Pendidikan 14

Tabel 3.2 Kesehatan 14

Tabel 3.3 Perumahan Rakyat 15

Tabel 3.4 Pekerjaan Umum dan Ruang 16

Tabel 3.5 Sosial 16

Tabel 3.6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... 17

Tabel 4.1 Hasil EPPD 17

Tabel 4.2 Opini Laporan Keuangan Daerah 18

Tabel 5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Berkelanjutan 19

Tabel 6 Inovasi Daerah..... 20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.2 Angka Kemiskinan 9

Grafik 2.5 PDRB Perkapita Kota Palopo tahun 2019-2023
(Juta/perkapita/tahun) 12

Grafik 2.6 Gini Rasio Kota Palopo, 2019-2023 13

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (RLPPD) KOTA PALOPO TAHUN 2023**

I. Latar Belakang

1.1 Undang- Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Kota Palopo dibentuk dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan ditetapkan pada tanggal 10 April 2002. Pembentukan Kota Palopo merupakan peningkatan status dari Kota Administratif Palopo Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1986 yang meliputi Kecamatan Wara, Wara Utara, Telluwanua, dan Wara Selatan.

1.2 Data Geografis Wilayah

Luas wilayah Kota Palopo kurang berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2002 adalah kurang lebih 247,52 Km², dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Luwu dan Toraja Utara

Pada posisi ini kedudukan geografis Kota Palopo berada pada posisi strategis sebagai titik simpul jalur transportasi darat dan laut poros Trans Sulawesi, menuju Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara serta Sulawesi Tenggara via jalan trans nasional dan transportasi laut.

Pada posisi ini Kota Palopo menjadi salah jalur distribusi barang jalur darat dari Makassar dan Pare- Pare menuju Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, sedangkan pada jalur transportasi laut Kota Palopo sudah menjadi salah satu pelabuhan laut menuju Kota-Kota di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dan daerah sekitar pesisir Teluk Bone.

Wilayah Kota Palopo terletak antara 2° 53'15" – 3° 04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" – 120°14'34" Bujur Timur, topografinya sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya diwilayah pesisir pantai sekitar 62,00% dari total luas daerah dengan ketinggian 0 –500 mdpl, sekitar 24,76% terletak pada ketinggian 501 – 1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 mdpl.

Tofografi wilayah Kecamatan, luas dan keadaan geografis digambarkan pada tabel sebagai berikut

Tabel 1.2 Luas Daerah dan Keadaan Geografis Di Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	KECAMATAN	LUAS AREA (Km2)	SEBAGIAN BESAR WILAYAH
1	Kecamatan Wara	11,49	Dataran Rendah
2	Kecamatan Wara Utara	10,58	Dataran Rendah
3	Kecamatan Wara Timur	12,08	Dataran Rendah
4	Kecamatan Wara Barat	54,13	Pegunungan
5	Kecamatan Wara Selatan	10,66	Dataran Rendah
6	Kecamatan Sendana	37,09	Pegunungan
7	Kecamatan Mungkajang	53,80	Pegunungan
8	Kecamatan Bara	23,35	Dataran Rendah
9	Kecamatan Telluwanua	34,34	Dataran Rendah
LUAS KESELURUHAN		247,52**	

Sumber : Palopo Dalam Angka 2020, Luas wilayah ini akan menyesuaikan dengan perhitungan pasti Luas wilayah setelah Penegasan dan Pengukuran Batas Wilayah

Kecamatan Wara Barat mempunyai wilayah paling luas 54,13 KM2, disusul Kecamatan Mungkajang 53,80 Km2 dengan ciri wilayah pegunungan, sedangkan Kecamatan Wara Timur, Wara Utara, Wara Selatan, Telluwanua, dan Bara wilayahnya berada pada dataran rendah/pesisir. Palopo memiliki garis pantai kurang lebih 20 Km berada di ujung Teluk Bone.

1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palopo tahun 2023 adalah sebesar 177.526 jiwa. secara terinci menurut jenis kelamin masing- masing 88.693 jiwa laki-laki dan 88.833 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 99,84. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 ke 2023 sebesar 2,67 persen. Dengan luas wilayah 247,52 Km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 712 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Wara Timur dengan 3.047 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Mungkajang yaitu 178 per kilometer persegi.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Terhadap Jenis Kelamin

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	7.612	6.971	14.583
5 - 9	8.570	8.040	16.610
10 - 14	8.651	8.213	16.864
15 - 19	7.068	6.878	13.946
20 - 24	7.742	7.736	15.478
25 - 29	7.427	7.593	15.020
30 - 34	7.153	7.333	14.486
35 - 39	7.213	6.924	14.137
40 - 44	6.684	6.465	13.149
45 - 49	5.444	5.590	11.034
50 - 54	4.813	4.902	9.715
55 - 59	3.667	3.794	7.461
60 - 64	2.510	2.898	5.408
65 - 69	1.765	1.955	3.720
70 - 74	1.091	1.388	2.479
75 +	1.283	2.153	3.436
<i>Jumlah/ Total</i>	88.693	88.833	177.526

1.4 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan, regulasi pembentukannya

Hingga tahun 2023 Jumlah Kecamatan di Kota Palopo sebanyak 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo. Penyesuaian kemudian dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Palopo, dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kota Palopo. Nama Kecamatan dan Kelurahan selengkapnya dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.4 Daftar nama Kecamatan dan Kelurahan se Kota Palopo

No	KECAMATAN	KELURAHAN	No	KECAMATAN	KELURAHAN
1	KEC. WARA		6	KEC. WARA BARAT	
	1	KEL. AMASSANGAN		31	KEL. TOMARUNDUNG
	2	KEL. BOTING		32	KEL. LEBANG
	3	KEL.DANGERAKKO		33	KEL. BATTANG
	4	KEL.LAGALIGO		34	KEL. BATTANG BARAT
	5	KEL. PAJALESANG		35	KEL. PADANG LAMBE
	6	KEL. TOMPOTIKKA	7	KEC. SENDANA	
2	KEC. WARA UTARA			36	KEL. PETA
	7	KEL. SABBAMPARU		37	KEL. MAWA
	8	KEL. BATUPASI		38	KEL. PURANGI
	9	KEL. LUMINDA		39	KEL. SENDANA
	10	KEL. PATTENE	8	KEC. MUNGKAJANG	
	11	KEL. PENGGOLI		40	KEL. MUNGKAJANG
	12	KEL. SALOBULO		41	KEL. MURANTE
3	KEC. WARA SELATAN			42	KEL. LATUPPA
	13	KEL. SAMPODDO		43	KEL. KAMBO
	14	KEL. SONGKA	9	KEC. BARA	
	15	KEL. TAKKALALA		44	KEL. TEMMALEBBA
	16	KEL. BINTURU		45	KEL. BALANDAI
4	KEC. TELLUWANUA			46	KEL. RAMPOANG
	17	KEL. MANCANI		47	KEL. TO'BULUNG
	18	KEL.BATU WALENRANG		48	KEL. BUNTU DATU
	19	KEL. MAROANGIN			
	20	KEL. PENTOJANGAN			
	21	KEL. JAYA			
	22	KEL. SALUBATTANG			
	23	KEL. SUMARAMBU			
5	KEC. WARA TIMUR				
	24	KEL. BENTENG			
	25	KEL. MALATUNRUNG			
	26	KEL. SURUTANGA			
	27	KEL. SALEKOE			
	28	KEL. SALOTELLUE			
	29	KEL. PONTAP			
	30	KEL. PONJALAE			

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Palopo tahun 2023

1.5 Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Personil

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo jumlah Perangkat Daerah sebanyak 49 Perangkat Daerah dengan sebaran personalia sebagaimana dalam tabel berikut :

Jumlah aparatur sipil negara Kota Palopo tahun 2023 sebanyak 4.075 orang dibandingkan tahun 2022 sebanyak 4.224

Tabel 1.5

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PALOPO MENURUT INSTANSI DAN GOLONGAN DI KOTA PALOPO TAHUN 2023

INSTANSI Instance		GOLONGAN KEPANGKATAN Rank				JUMLAH Total
		I	II	III	IV	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemerintah Kota Palopo (Staf Ahli Walikota)	0	0	0	2	2
2	Sekretariat Daerah Kota Palopo	1	32	80	17	130
3	Sekretariat KPU	0	0	0	0	0
4	Sekretariat DPRD	0	8	17	8	33
5	RSU. Daerah Sawerigading Palopo	1	27	155	132	315
6	RSU. dr. Pallemai Tandi	0	11	81	59	151
7	Inspektorat Kota Palopo	0	3	23	17	43
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	8	27	4	39
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	14	8	22
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	4	18	8	30
11	Badan Pendapatan Daerah	0	7	28	3	38
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	8	27	5	40
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	13	5	19
14	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	14	5	19
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	10	53	8	71
16	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	0	9	61	46	116
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	5	26	4	35
18	Dinas Lingkungan Hidup	1	15	33	4	53
19	Dinas Pendidikan	0	6	33	32	71
20	Dinas Kesehatan	0	6	30	22	58
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	3	22	3	28
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	3	17	4	24
23	Dinas Perhubungan	0	16	46	5	67
24	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	3	21	4	28
25	Dinas Perikanan	0	2	31	5	38
26	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	4	23	5	32
27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1	25	5	31
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	6	23	5	34
29	Dinas Sosial	0	5	18	3	26
29	Dinas Sosial	0	5	18	3	26
30	Satuan Polisi Pamong Praja	0	10	25	6	41
31	Dinas Ketahanan Pangan	0	4	13	4	21

INSTANSI Instance		GOLONGAN KEPANGKATAN Rank				JUMLAH Total
		I	II	III	IV	
32	Dinas Perindustrian	0	0	10	5	15
33	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	8	20	3	31
34	Dinas Kebudayaan	0	2	13	6	21
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	14	5	20
36	Dinas Perdagangan	0	3	20	6	29
37	Dinas Kearsipan	0	1	12	6	19
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	4	10	5	19
39	Dinas Tenaga Kerja	0	2	13	4	19
40	Dinas Pertanahan	0	0	18	4	22
41	Dinas Perpustakaan	0	2	15	5	22
42	Dinas Transmigrasi	0	2	13	8	23
43	Dinas Persandian dan Statistik	0	3	14	6	23
44	Kecamatan	0	21	88	19	128
45	Kelurahan	2	67	263	0	332
46	Puskesmas Kota Palopo	0	68	280	143	491
47	UPTD SKB Dinas Pendidikan	0	0	5	6	11
48	UPT Pusat Niaga Palopo	0	6	2	0	8
49	UPT Pasar Andi Tadda	0	2	1	0	3
50	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	3	0	3
51	UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga	0	0	0	0	0
52	UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Mancani	0	0	0	0	0
53	UPT Penerangan Jalan Umum	1	4	15	0	20
54	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	0	1	3	0	4
55	UPT Instalasi Farmasi	0	0	0	0	0
56	UPT Jemput Antar	0	3	5	0	8
57	UPT Pengendalian Program Kependudukan dan KB Wara	0	0	0	0	0
58	UPT Pengendalian Program Kependudukan dan KB Wara Selatan	0	0	0	0	0
59	UPT Pengendalian Program Kependudukan dan KB Wara Utara	0	0	0	0	0
60	UPT Pengendalian Program Kependudukan dan KB Wara Timur	0	0	0	0	0
61	UPT Pengendalian Program Kependudukan dan KB Wara Barat	0	0	0	0	0
62	UPT Pengendalian Program Kependudukan dan KB Telluwanua	0	0	0	0	0
63	UPT Pengendalian Program Kependudukan dan KB Mungkajang	0	0	0	0	0
64	UPT Pengendalian Program Kependudukan dan KB Sendana	0	0	0	0	0
65	UPT Pengendalian Program Kependudukan dan KB Bara	0	0	0	0	0
66	UPT Pembibitan Ternak	0	0	0	0	0
67	UPT Tempat Pembuangan Akhir	0	0	1	0	1
68	UPT Rumah Pangan	0	0	0	0	0
69	UPT Metrologi Legal	0	1	3	0	4
70	UPT Industri Pangan	0	0	0	0	0
71	UPT Tempat Penjualan Ikan	0	1	2	0	3

INSTANSI Instance		GOLONGAN KEPANGKATAN Rank				JUMLAH Total
		I	II	III	IV	
72	UPT Balai Latihan Kerja	0	0	0	0	0
73	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0
74	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	0	1	1	0	2
75	UPT Pengawasan, Pengendalian dan Penerbitan Perizinan	0	0	0	0	0
76	UPT Balai Benih Ikan	0	2	0	0	2
77	Sekolah Menengah Pertama	0	5	181	278	464
78	Sekolah Dasar	0	8	358	238	604
79	Taman Kanak-Kanak	0	5	43	21	69
	JUMLAH/ Total	6	440	2423	1206	4075

II. Capaian Kinerja Makro

Kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan adalah ukuran secara umum kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ditunjukkan dengan data-data yang secara umum dipakai dalam analisis pembangunan, antara lain adalah Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran terbuka , pendapatan perkapita, ketimpangan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi. Adapun data kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo berdasarkan data tersebut diuraikan sebagai berikut :

2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan IPM Kota Palopo tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama pada dimensi standar hidup layak. Seluruh indikator yang mewakili dimensi IPM mengalami percepatan pertumbuhan. Indikator Pengeluaran Riil per Kapita memiliki percepatan yang lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya. Pertumbuhan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,64 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 0,26 persen, 0,13 persen, dan 0,36 persen

Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2023

Dimensi Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	73,53	73,57	73,81	74,00
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,08	15,09	15,10	15,12
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,76	10,94	11,09	11,13
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	12,995	13,117	13,404	13,892
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		79,39	79,72	80,24	80,77

2.2 Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Palopo pada Maret 2023 sebesar 14,85 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 0,07 ribu jiwa atau sekitar 70 jiwa terhadap Maret 2022 (14,78 ribu jiwa) dan menurun sebesar 0,36 ribu jiwa terhadap Maret 2021 (15,21 ribu jiwa) Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 7,69 persen, turun sebesar 0,09 persen poin dari Maret 2022 (7,78 persen) dan turun 0,45 persen poin dari Maret 2021 (8,14 persen). Pada Maret 2023, Garis Kemiskinan sebesar Rp 442.276,-/kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp 39.132,-/kapita/bulan. Pada Periode 5 tahun terakhir, Garis Kemiskinan terus mengalami peningkatan. Garis Kemiskinan telah meningkat sebesar Rp 118.043,-/kapita/bulan dari Rp 324.233,- / kapita/bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 442.276,-/kapita/bulan pada Maret 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2023 masing-masing sebesar 1,10 dan 0,25. Kedua Indeks ini mengalami penurunan selama periode Maret 2022-Maret 2023 dengan penurunan masing-masing sebesar 0,33 poin dan 0,1 poin.



Secara umum tingkat kemiskinan di Kota Palopo pada Maret 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Maret 2022 secara persentase. Persentase penduduk miskin di Kota Palopo pada Maret 2023 tercatat sebesar 7,69 persen menurun sebesar 0,09 persen poin dibandingkan periode Maret 2022 (7,78 persen). Selanjutnya secara jumlah, penduduk miskin di Kota Palopo meningkat sebesar 0,07 ribu jiwa atau sekitar 70 jiwa dibandingkan dengan Maret 2022. Hal tersebut disebabkan oleh adanya lonjakan jumlah penduduk sebesar 3.581 jiwa di tahun 2023. Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Palopo tersaji pada gambar

2.3 Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran tertinggi dialami oleh Kota Makassar sebesar 10,6, sedangkan Kota Palopo merupakan kota dengan tingkat pengangguran kedua tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 7,81.

Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (tahun), 2020– 2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Regency/Municipality				
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Selayar	2,44	2,81	1,49	1,9
Bulukumba	3,42	3,14	1,26	1,3
Bantaeng	4,27	4,07	2,72	3,7
Jeneponto	2,31	2,38	2,21	2,1
Takalar	4,16	3,93	2,63	3,5
Gowa	6,44	4,30	3,26	3,4
Sinjai	2,65	2,61	1,8	1,6
Maros	6,28	6,30	5,04	3,6
Pangkajene Kepulauan	5,18	5,86	5,23	5,0
Barru	6,39	6,74	5,32	5,8
Bone	3,20	4,15	2,27	2,8
Soppeng	4,42	3,92	3,4	4,3
Wajo	4,33	4,32	2,54	2,
Sidrap	5,91	4,93	3,56	3,2
Pinrang	4,19	4,06	2,79	3,6
Enrekang	2,44	2,34	0,58	1,5
Luwu	4,94	4,80	3,85	3,
Tana Toraja	2,60	3,09	2,32	3,3
Luwu Utara	3,01	3,91	2,81	2,6
Luwu Timur	4,46	4,96	4,48	5,4
Toraja Utara	3,17	2,61	1,99	2,
Makassar	15,92	13,18	11,82	10,
Pare-pare	7,14	6,72	5,6	5,8
Palopo	10,37	8,83	8,2	7,8
Sulawesi Selatan	6,31	5,72	4,51	4,33

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun keatas. PUK terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palopo adalah sebesar 65,75 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nya adalah sebesar 7,81 persen. Sebanyak 25,63 persen PUK

berpendidikan S1 ke atas. Jika dilihat menurut jam kerja seluruhnya, 71,36 persen PUK bekerja selama 35 jam atau lebih, sedangkan 54,64 persen.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai ukur dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output), maka pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional menggunakan harga konstan tahun 2010 sebagai tahun dasar.

Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2021–2023

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan(miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2021	5.768,28	5,41
2022	6.104,74	5,83
2023	6,369.71	4.34

Sumber Data: BPS Kota Palopo 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi kota palopo pada tahun 2023 tumbuh lebih lambat bila dibandingkan tahun 2022. Percepatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir semua lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Palopo tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 6,37 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,83 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,83 persen.

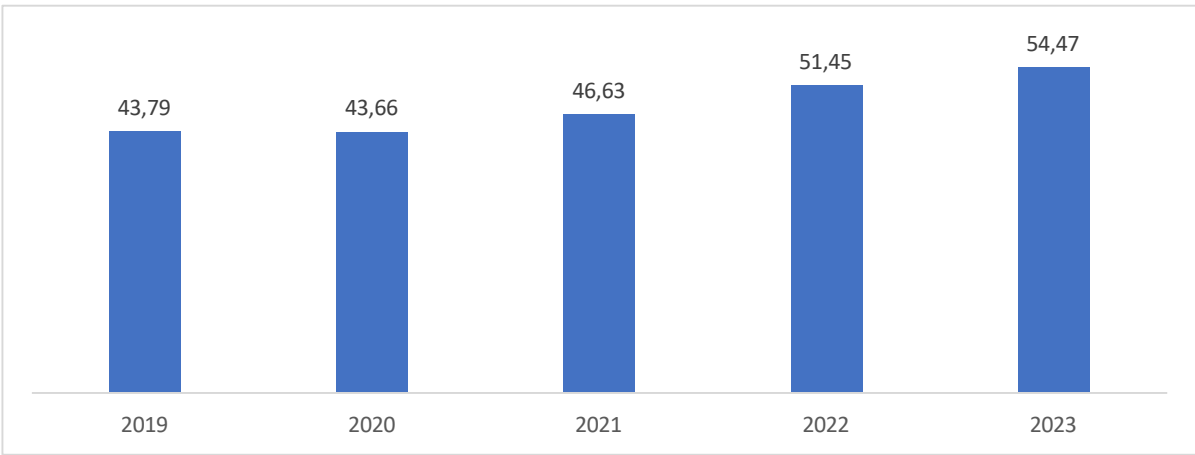
Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palopo tahun 2023 tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semua lapangan usaha selama tahun 2023 tumbuh positif kecuali 2 lapangan usaha yang tumbuh negatif. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontraksi atau tumbuh negatif sebesar 0,50 persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang berkontraksi atau tumbuh negatif sebesar 1,89 persen. Sektor yang mempunyai pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2023 yaitu sektor jasa lainnya yang tumbuh sebesar 10,68 persen. Pada tahun 2023, aktivitas rekreasi masyarakat meningkat cukup signifikan pasca terjadinya Covid-19.

Bila dilihat dari sumber pertumbuhannya, laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sepanjang tahun 2023 sebesar 4,34 persen disumbang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,32 persen dan sektor konstruksi sebesar 0,75 persen.

2.5 Pendapatan Perkapita

PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode tertentu. Sementara itu, PDRB Perkapita Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB untuk setiap satu orang penduduk.

Grafik 2.5 PDRB Perkapita Kota Palopo tahun 2019-2023 (Juta/perkapita/tahun)



Sumber : BPS Kota Palopo, 2019 – 2023

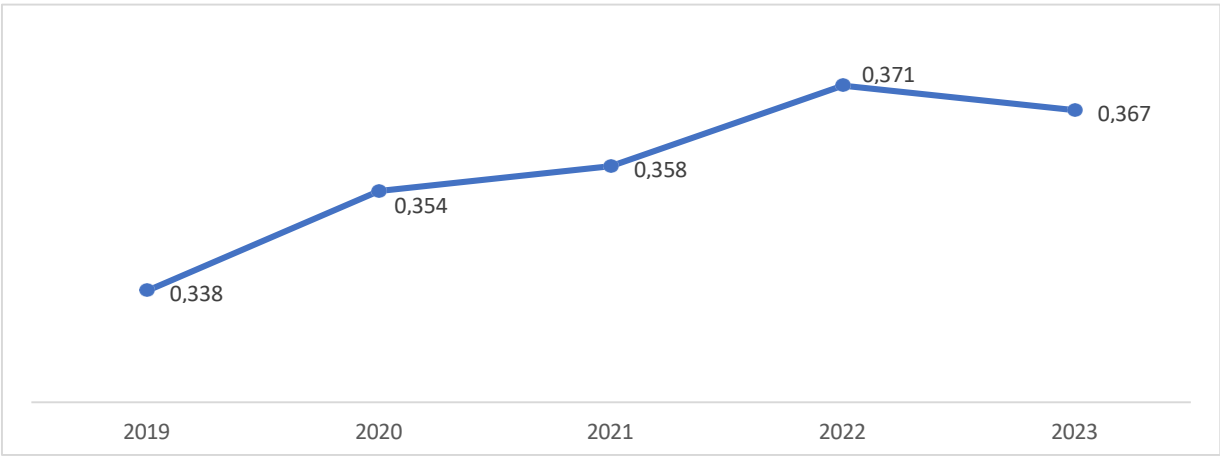
Pada tahun 2020, PDRB perkapita atas dasar Harga Berlaku Kota Palopo rata-rata sebesar 43,66 juta rupiah atau turun sebesar 0,13 juta rupiah perkapita dibandingkan tahun 2019. Pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020, meskipun perekonomian Kota Palopo tetap tumbuh melambat, namun peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak selaju pertumbuhan penduduk pada saat itu.

Hal inilah yang menyebabkan nilai PDRB perkapita tahun 2020 lebih kecil bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, kondisi perekonomian sudah cenderung membaik. PDRB perkapita tahun 2023 tercatat sebesar 54,47 juta rupiah perkapita. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palopo secara rata-rata cenderung lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.6 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Pendapatan penduduk merupakan salah satu ukuran yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pembangunan ekonomi. Salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pendapatan penduduk adalah Gini Ratio. Gini Ratio merupakan suatu indeks untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran secara menyeluruh.

Grafik 2.6 Gini Rasio Kota Palopo, 2019-2023



Sumber : BPS Kota Palopo, 2019 – 2023

Nilai gini rasio $0 < x < 1$, atau dalam rentang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Semakin besar nilai gini rasio menunjukkan ketimpangan yang tinggi antara penduduk miskin dan kaya, sedangkan semakin kecil atau mendekati 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Indikator gini rasio menunjukkan semakin rendah / mendekati 0 adalah semakin baik.

Dari tahun 2019 hingga 2022, tren gini ratio di Kota Palopo mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi nilai Gini Ratio terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,354 poin atau naik sebesar 0,016 poin dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan/pengeluaran masyarakat Kota Palopo semakin timpang. Kue perekonomian yang seharusnya terbagi merata ke seluruh penduduk hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Pada tahun 2023, gini rasio mengalami penurunan sebesar 0,004

poin menjadi sebesar0,367 poin.Penurunan yang relatif kecil tersebut menunjukan perbaikan ketimpangan setelah selama 3 tahun mengalami peningkatan.

III. Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar adalah capaian kinerja pada 6 (enam) Urusan Pemerintah (Urusan Pendidikan, urusan kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial

3.1 Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dasar dan Capaian Kinerja Sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5 sampai 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	56,98	Dinas Pendidikan
2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 sampai 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	80,85	
3	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 sampai 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	61,59	

3.2 Kesehatan

Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan 14 (Empat Belas) Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	22,36	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hami	88,86	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,37	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,22	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,95	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102,11	

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,17	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,48	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,79	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,78	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	86,97	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	97,85	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	101,93	

3.3 Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	100	
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	

3.4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pekerjaan Umum dan Ruang

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	65,36	Dinas Pekerjaan Umum
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	90,9	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	84,38	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,68	
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,21	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	45,45	

3.5 Sosial

Penyelenggaraan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5 Sosial

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	

3.6 Ketentramaan, Ketertibaan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Bidang Ketentramaan, Ketertibaan Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dasar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dasar dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dasar dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Sumber Data
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Dinas Satpol PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	DAMKAR
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	6 menit	

IV. Hasil EPPD Dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

4.1 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terkait dengan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Tim Nasional Kementerian Dalam Negeri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palopo pada Tahun 2022. Telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022, Tanggal 21 Desember 2023. Hasil EPPD khususnya pada Kota Palopo didapatkan skor sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil EPPD

Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
Kota Palopo	2,47	Rendah

4.2 Opini Laporan Keuangan Daerah

Hasil Opini terhadap Laporan Keuangan sembilan (9) kali berturut turut mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang di keluarkan oleh BPKP dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

Tabel 4.2 Opini Laporan Keuangan Daerah

NO.	Tahun	Opini	Data Dukung
1	2023	WTP	Surat Opini BPK
2	2022	WTP	Surat Opini BPK
3	2021	WTP	Surat Opini BPK
4	2020	WTP	Surat Opini BPK
5	2019	WTP	Surat Opini BPK
6	2018	WTP	Surat Opini BPK
7	2017	WTP	Surat Opini BPK
8	2016	WTP	Surat Opini BPK
9	2015	WTP	Surat Opini BPK

V. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Berkelanjutan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah, PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Palopo tahun 2023 terealisasi sebesarRp 943.087.588.524,71,- atau 83,29% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target realisasi dan capaian pendapatan tahun 2023.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Berkelanjutan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / KURANG	% REALISASI
4	PENDAPATAN	1.132.254.991.869,00	943.087.588.524,71	(189.167.403.344,29)	83,29
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	343.052.414.226,00	194.013.652.599,96	(149.038.761.626,04)	56,56
4.1.1	Pajak Daerah	45.867.000.000,00	46.687.824.782,00	820.824.782,00	101,79
4.1.2	Retribusi Daerah	11.722.844.000,00	10.560.295.890,00	(1.162.548.110,00)	90,08
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.347.070.226,00	7.347.070.226,00	-	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	278.115.500.000,00	129.418.461.701,96	(148.697.038.298,04)	46,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	746.306.406.557,00	736.792.265.269,75	(9.514.141.287,25)	98,73
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.928.190.461,00	664.160.569.371,00	(1.767.621.090,00)	99,73
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.378.216.096,00	72.631.695.898,75	(7.746.520.197,25)	90,36
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.896.171.086,00	12.281.670.655,00	(30.614.500.431,00)	28,63
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.896.171.086,00	12.281.670.655,00	(30.614.500.431,00)	28,63
5	BELANJA DAERAH	1.144.221.381.279,00	927.786.559.564,18	(216.434.821.714,82)	81,08
5.1	BELANJA OPERASI	820.878.817.249,00	745.228.569.827,38	(75.650.247.421,62)	90,78
5.1.1	Belanja Pegawai	456.816.650.847,00	428.698.208.691,01	(28.118.442.155,99)	93,84
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339.662.321.412,00	303.586.612.693,37	(36.075.708.718,63)	89,38
5.1.3	Belanja Bunga	1.100.000.000,00	1.097.664.953,00	(2.335.047,00)	99,79
5.1.5	Belanja Hibah	23.072.844.990,00	11.735.083.490,00	(11.337.761.500,00)	50,86
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	227.000.000,00	111.000.000,00	(116.000.000,00)	48,90
5.2	BELANJA MODAL	322.042.564.030,00	182.557.989.736,80	(140.284.574.293,20)	56,55
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.500.995.620,00	2.929.937.020,00	(1.571.058.600,00)	65,10
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.879.952.949,00	27.169.075.627,00	(6.710.877.322,00)	80,19
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.387.574.961,00	96.589.452.094,00	(80.798.122.867,00)	54,45
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	105.013.089.200,00	53.849.358.711,80	(51.163.730.488,20)	51,28
5.2.5	Modal Belanja Aset Tetap Lainnya	2.060.951.300,00	2.020.166.284,00	(40.785.016,00)	98,02
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-
5.3.1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.966.389.410,00)	15.301.028.960,53	27.267.418.370,53	127,87
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.907.764.410,00	14.907.764.409,58	(0,42)	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.907.764.410,00	14.907.764.409,58	(0,42)	100,00
6.2	PENGELUARAN DAERAH	2.941.375.000,00	2.941.373.130,00	(1.870,00)	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.941.375.000,00	2.941.373.130,00	(1.870,00)	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	11.966.389.410,00	11.966.391.279,58	1.869,58	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	27.267.420.240,11	27.267.420.240,11	100,00

VI. Inovasi Daerah

Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan tahun 2023 serta efektivitas dan efisien kebijakan pada Pemerintah Kota Palopo maka dibuatlah rangkaian inovasi dan inovasi baru daerah diberbagai bidang urusan pemerintahan. diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Inovasi Daerah

NO	Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
1	Optimalisasi Pengolahan untuk Data Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) “ OPU DATU”	Digital/Inovasi Pelayanan publik	Meningkatkan perlindungan konsumen serta pemilik UTTP dalam hal keakuratan penunjukan pengukuran.
2	“ SIPORAIKI” Sistem Pelaporan Standar Pelayanan Minimal, Akurat dan Sistematis	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah/Digital	· Membuat Lapotan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi lebih efisien · Mempercepat dan mempermudah pekerjaan Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) · Menghemat biaya Operasional untuk sumber daya manusia yang tidak terlalu dibutuhkan
3	WARA BERBENAH (Pelayanan Informasi Pembangunan Melalui Tata Kelola Data Potensi Kecamatan Berbasis Teknologi Informasi di Kecamatan Wara Kota Palopo	Inovasi Pelayanan Publik/Digital	Terwujudnya sistem pelayanan informasi di Kecamatan Wara Kota Palopo yang berbasis IT, informasi potensi Kecamatan dapat diakses dan memudahkan masyarakat untuk melihat perkembangan pembangunan dan potensi yang ada di Kecamatan Wara
4	Peta Informasi IKM online (PIKMOL)	Inovasi Pelayanan Publik/Digital	· Meningkatkan IKM Kota Palopo · Memudahkan IKM dalam memasarkan produknya · Memudahkan masyarakat lokal dan luar Kota Palopo dalam mendapatkan informasi IKM · Memudahkan masyarakat dalam memilih produk IKM · Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan harga pasar yang terjangkau dan sesuai keinginan
5	Sistem Informasi Data Urusan Pemerintahan Perencanaan Anggaran (SIDUPPA) Kota Palopo	Inovasi tata kelola Pemerintahan	· Mendukung kemudahan dalam pemanfaatan aplikasi SIPD dan aplikasi KRISNA-DAK;

NO	Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
		daerah DIGITAL	· Mendukung Pemerintah Kota Palopo dalam penyediaan data bagi yang membutuhkan secara up to date; · Sebagai pendukung dalam mendapatkan Dana DAK dari Pemerintah pusat; · Mendukung dalam pencapaian keberhasilan
6	SIKEPO (Sisten Informasi Kelurahan Ponjalae) Kota Palopo	Inovasi Pelayanan publik Digital	· Terciptanya pelayanan prima dikelurahan Ponjalae · Meningkatkan pelayanan di Kelurahan Ponjalae · Meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja Kelurahan Ponjalae
7	SiELIT BANKSA (Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Teknopark Sagu) Kota Palopo	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan	· Meningkatkan peran Teknopark Sagu di Kota Palopo · Tersedianya media dokumentasi dari kegiatan penelitian dan pengembangan Teknopark Sagu di Kota Palopo · Tersosialisasinya kegiatan penelitian dan pengembangan komoditas Sagu dalam wadah sebuah Teknopark di Kota Palopo
8	Peningkatan Efektivitas Administrasi Kependudukan Melalui Layanan DIMEDSOS (Digital Media Sosial) Kelurahan Songka Kota Palopo	Inovasi Pelayanan publik/Digital	Memberikan kepuasan kepada Masyarakat kelurahan Songka Kota Palopo melalui proses Pelayanan Cepat, Mudah dan Murah
9	Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIPADA) Kota Palopo	Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah/Digital	Mempermudah pengelolaan; terupdatenya data informasi Barang Milik daerah; terupdatenya data dan informasi terkait aset daerah; dan meningkatkan kualitas pengendalian dalam pengelolaan barang milik
10	KOPI MANTAP (Kolaborasi Tiga Pilar Trantib Plus Sinegritas Mitra Trantib		· Mencegah terjadinya tindak aksi kriminal dalam kejahatan

NO	Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
	dalam Mengoptimalkan Gangguan Kamtibmas di Kelurahan Pontap)	Inovasi Pelayanan publik/ Digital	· Meningkatkan rasa aman dari masyarakat dari kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban · Terbantunya masyarakat yang menghadapi gangguan-gangguan kamtibmas
11	PATIKALA (Pensiun Ala Elektronik Kota Palopo)	Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah/Digital	· Mewujudkan Visi Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan berkelanjutan serta salah satu Misi Kota Palopo untuk memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintah · Mempercepat proses pelayanan pengajuan pensiun PNS di BKPSDM Kota Palopo · Meningkatkan Efektifitas dan efesien dalam proses pengajuan pensiun Pemerintah Kota Palopo · Meningkatkan kinerja BKPSDM Kota Palopo dalam memberikan pelayanan di Bidang Kepegawaian khususnya pelayanan pensiun · OPD dan/atau pensiunan di lingkungan Pemerintah Kota Palopo di mudahkan dalam pelayanan pengurusan pensiun karena proses birokrasi yang lebih sederhana dan efisien serta dapat memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pensiun Online berbasis web sebagai sarana pengajuan usulan pensiun serta sebagai alat kontrol status SK pensiun pada Pemerintah Kota Palopo
12	SIMPONI CERIA (Sistem Pendaftaran Online Cepat Ringkas dan Akurat)RSUD Sawerigading Kota Palopo	Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah/Digital	· Terciptanya pelayanan prima secara kepuasan di masyarakat dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efesien · Meminimalisir terjadinya penyakit menular di Lingkungan Rumah Sakit.

